

Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Wilayah Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar

Idal Bahri*¹, Yunida Pangastuti¹, Mohd. Isa T. Ibrahim², Mahyuddin²

¹⁾ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar

²⁾ Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar

*Email Korespondensi: idal_wcc@yahoo.com

Abstract: The availability of good infrastructure can encourage investment activities which in turn can increase the economic growth of a region. Positive economic growth will lead to a significant acceleration of development activities in the region. In other words, a condition will be created in which the area will develop. On the other hand, the high demand for infrastructure is not followed by sufficient capacity to provide funding sources for infrastructure development. After regional autonomy, infrastructure development is not only the responsibility of the central government, but also the responsibility of regional governments. However, regional funding for infrastructure development is very limited, so that until now basic infrastructure funding in the regions still relies on funding sources from the APBN which are transferred to the APBD. Whereas infrastructure is one of the main stimulus for economic growth. Therefore, it is important to examine the availability of infrastructure in Pulo Aceh, especially in encouraging community economic activities as well as domestic and foreign investment, international investments that can spur regional economic growth in Pulo Aceh. The analytical method used is qualitative analysis. The variables analyzed include road infrastructure, electricity, telecommunications and clean water.

Keywords: Infrastructure, and Regional Development

Abstrak: Ketersediaan infrastruktur yang baik dapat mendorong kegiatan investasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan menimbulkan akselerasi kegiatan pembangunan di wilayah tersebut secara signifikan. Dengan kata lain akan terciptanya suatu kondisi dimana wilayah tersebut akan berkembang. Disisi lain, tingginya kebutuhan infrastruktur, tidak diikuti oleh kemampuan yang cukup untuk menyediakan sumber pendanaan bagi pembangunan infrastruktur. Setelah otonomi daerah, pembangunan infrastruktur bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah Daerah Namun, pendanaan daerah untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas, sehingga sampai saat ini pendanaan infrastruktur dasar di daerah masih mengandalkan sumber pembiayaan dari APBN yang ditransfer ke APBD. Padahal infrastruktur merupakan salah satu stimulus utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk dikaji ketersediaan infrastruktur di Pulo Aceh terutama dalam

mendorong kegiatan ekonomi masyarakat serta investasi dalam negeri maupun investasi internasional yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah di Pulo Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Variabel yang dianalisis meliputi infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi dan air bersih..

Kata kunci : Infrastruktur, dan Pengembangan Wilayah

Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya yang merupakan social overhead capital, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional (Bappenas,2003). Modernisasi ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur untuk berkembang. Jalan dan jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik, dan jaringan telepon perlu dikembangkan. Perkembangan infrastruktur haruslah selaras dengan pembangunan ekonomi. Pada tahap pembangunan yang rendah, infrastruktur yang diperlukan masih terbatas. Pada tingkat ini penumpuan perkembangan adalah untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, listrik, dan infrastruktur lain dalam taraf yang sederhana. Semakin maju suatu perekonomian, semakin banyak infrastruktur diperlukan. Dengan demikian mengembangkan infrastruktur harus secara terus menerus dilakukan dan harus diselaraskan dengan kemajuan ekonomi yang telah dicapai dan yang ingin diwujudkan pada masa depan (sukirno,2004, hal 442).

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses interaktif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang dinamis. Dengan kata lain, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang selalu berkembang yang telah diujiterapkan. Selanjutnya dirumuskan kembali

menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, konsep pengembangan wilayah di Indonesia terdapat beberapa landasan teori yang turut mewarnai keberadaannya. Keberadaan landasan teori dan konsep pengembangan wilayah di atas kemudian diperkaya dengan gagasan-gagasan yang lahir dari pemikiran putra-putra bangsa. Diantaranya adalah Sutami (era 1970 an) dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah. Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota dan hikarki prasarana jalan melalui orde kota.

Pada periode 80 an ini pula, lahir strategi nasional pembangunan perkotaan (SNPP) sebagai upaya untuk mewujudkan sistem kota nasional yang efisien dalam konteks pengembangan wilayah nasional. Dalam perjalanannya SNPP ini pula menjadi cikal bakal lahirnya konsep program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) sebagai upaya sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan fungsi dan peran kota yang diarahkan dalam SNPP. Pada era 90 an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misal antara KTI dan KBI, antara kawasan dalam wilayah pulau, maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Perkembangan terakhir pada awal abad millenium bahkan, mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemahaman teoritis dan pengalaman empiris di atas, maka secara konseptual pengertian pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berpijak pada pengertian di atas maka pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumberdaya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya alam, buatan, manusia

dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.

Begitu juga halnya dengan Kecamatan Pulo Aceh yang terletak di Kabupaten Aceh Besar memerlukan sejumlah infrastruktur untuk mempercepat akselerasi pembangunan di kawasan tersebut. Pulo Aceh secara administrative merupakan wilayah Aceh Besar, sekaligus juga termasuk dalam kawasan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Sebagai wilayah penyangga ibukota Provinsi juga memerlukan infrsastruktur yang relative baik, terutama dalam mendukung pembangunan industry perikanan dan pariwisata di Pulo Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikemukakan yaitu: infrastruktur apa yang dibutuhkan untuk memamacu pengembangan wilayah, yang pada gilirannya akan menimbulkan akselerasi ekonomi secara siqnifikan pada wilayah sekitarnya (hinter land). Hal ini pada akhirnya dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi di kawaan tersebut. Dengan demikian pembangunan infrastruktur dalam pengembangan Kecamatan Pulo Aceh dapat dilakukan secara sistematis, logis, kondisional dan realistis sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan investor, sehingga kualitas hidup masyarakat Kecamatan Pulo Aceh kedepan akan lebih baik.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Infrastruktur

Fox (2004) mendefinisikan infrastruktur sebagai, "*those Services derived from the set of public work traditionally supported by the public sector to enhance private sector production and to allow for household consumption*". Infrastruktur tidak hanya terbatas pada sudut pandang ekonomi melainkan juga pertahanan dan keberlanjutan pemerintah. Selanjutnya Vaughn and Pollard (2003), menyatakan infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan telekomunikasi. Merujuk pada konsep dan definisi infrastruktur di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa infrastruktur secara umum meliputi fasilitas-fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai pelayan public (sebagai akibat mekanisme pasar tidak bekerja) untuk menunjang

dan mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial suatu masyarakat.

Konsep Pengembangan Wilayah

Menurut Pebrina (2005) arah bagi kebijakan pembangunan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan melihat spesialisasi keunggulan dari tiap wilayah atau kecamatan. Skala yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah dalam sistem ekonomi, administrasi, dan pelayanan umum berakibat fungsi dari wilayah tersebut berbeda pula dalam pola, harmonisasi yang mampu saling menunjang wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dalam rangka penyelarasan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dalam suatu daerah dikemukakan konsep pendekatannya yaitu pengembangan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pendekatan dengan ruang lingkup kecamatan dimaksudkan agar pemerataan pembangunan antar wilayah dapat lebih merata dengan menemukenali spesialisasi dari masing-masing wilayah. Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dimaksudkan untuk mengidentifikasi aktifitas-aktifitas ekonomi yang menjadi keunggulan dari suatu kecamatan sehingga dapat ditentukan kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan melihat spesialisasi keunggulannya.

Dengan demikian dalam jangka panjangnya pengembangan wilayah mempunyai target untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cara mencapainya bersandar pada kemampuan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan lingkungan sekitar dan daya tampungnya serta kemampuan memanfaatkan peralatan pendukung (instrument) yang ada. Dengan target tersebut dirancang skenario-skenario tertentu agar kekurangan-kekurangan yang dihadapi dapat diupayakan melalui pemanfaatan sumberdaya.

Kajian pengembangan wilayah di Indonesia selama ini selalu didekati dari aspek sektoral dan aspek spasial. Pada kajian aspek sektoral lebih menyatakan ukuran dari aktivitas masyarakat suatu wilayah dalam mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya. Sementara itu, kajian aspek spasial/keruangan lebih menunjukkan arah dari kegiatan sektoral atau dimana lokasi serta dimana sebaiknya lokasi kegiatan sektoral tersebut. Pada aspek inilah Sistem Informasi Geografi (SIG) mempunyai peran yang cukup strategis, dikarenakan SIG mampu menyajikan aspek keruangan/spasial dari fenomena/fakta yang dikaji (Susilo, K., 2000). Pendekatan yang mengacu pada aspek sektoral dan spasial tersebut mendorong

lahirnya konsep pengembangan wilayah yang harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan ruang sesuai daya dukung, mampu memberi kesempatan kepada sektor untuk berkembang tanpa konflik dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata. Konsep tersebut digolongkan dalam konsep pengembangan wilayah yang didasarkan pada penataan ruang. Dalam kaitan itu terdapat 3 (tiga) kelompok konsep pengembangan wilayah yaitu konsep pusat pertumbuhan, konsep integrasi fungsional, dan konsep pendekatan desentralisasi (Alkadri et al, Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah, 1999). Konsep pusat pertumbuhan menekankan pada perlunya melakukan investasi secara besar-besaran pada suatu pusat pertumbuhan atau wilayah/kota yang telah mempunyai infrastruktur yang baik. Pengembangan wilayah di sekitar pusat pertumbuhan diharapkan melalui proses/mekanisme tetesan ke bawah (trickle down effect).

Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan tinggi dengan mengandalkan keunggulan komparatif (comparative advantage) berupa kekayaan alam berlimpah, upah murah atau yang dikenal dengan 'bubble economics', sudah usang karena terbukti tak tahan terhadap gelombang krisis. Walaupun teori keunggulan komparatif tersebut telah bermetamorfose dari hanya memperhitungkan faktor produksi menjadi berkembangnya kebijaksanaan pemerintah dalam bidang fiskal dan moneter, ternyata daya saing tidak lagi terletak pada faktor tersebut (Alkadri et.al. (1999). Kenyataan menunjukkan bahwa daya saing dapat pula diperoleh dari kemampuan untuk melakukan perbaikan dan inovasi secara menerus. Menurut Porter (1990) keunggulan komparatif telah dikalahkan oleh kemajuan teknologi.

Namun demikian setiap wilayah masih mempunyai faktor keunggulan khusus yang bukan didasarkan pada biaya produksi yang murah saja, tetapi lebih dari itu yaitu adanya inovasi untuk pembaharuan. Suatu wilayah dapat meraih keunggulan daya saing melalui 4 (empat) hal yaitu keunggulan faktor produksi, keunggulan inovasi, kesejahteraan masyarakat, dan besarnya investasi. Apabila dicermati maka paradigma pengembangan wilayah telah bergeser pada upaya yang mengandalkan 3 (tiga) pilar, yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan teknologi.

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Menurut Azis (1999), pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak yang

positif di antaranya:

- a. Dapat membuka keterisolasian antar daerah dan membangun konektivitas antardaerah,
- b. Meningkatkan aktivitas dan mendukung kelancaran roda perekonomian wilayah,
- c. Mempermudah masuknya penggunaan akses teknologi terbaru

Infrastruktur yang memberikan pengaruh besar pada perekonomian dapat berupa kondisi jalan raya yang menjadi penghubung satu wilayah ke wilayah lainnya, keberadaan listrik sebagai sumber utama dalam kegiatan produksi, serta akses terhadap air bersih dan sarana kesehatan yang menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Kesemuanya itu bersinergi dalam meningkatkan kinerja perekonomian dengan mekanisme tertentu.

Kondisi jalan yang baik akan mempermudah kegiatan ekonomi baik dalam pengadaan input maupun pemasaran output. Waktu yang digunakan semakin singkat, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan mereka dengan harga yang memadai karena biaya produksi yang dapat ditekan oleh produsen.

Kinerja infrastruktur melalui Indeks Pembangunan Infrastruktur telah diteliti oleh Patra & Acharya (2011) dan menghasilkan bahwa ada hubungan positif antara Indeks Pembangunan Infrastruktur dan Produk Domestik Bersih negara per kapita. Bukti empiris menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki potensi tinggi untuk mempengaruhi pertumbuhan produk domestik bersih per kapita, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan pada akhirnya membantu ekonomi. Selanjutnya perlu upaya untuk menciptakan lebih banyak fasilitas infrastruktur di tingkat negara bagian, untuk meningkatkan produk domestik negara dan mengurangi tingkat kemiskinan dan pada akhirnya standar hidup masyarakat yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini mencakup wilayah Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar terletak di ujung paling Barat Indonesia (lihat Peta). Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh terletak pada 5,2o-5,8o Lintang Utara (LU) dan 95,0o -95,8o Bujur Timur (BT) dengan luas wilayahnya 2.974,12 km².

Beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokasi di antaranya adalah:

- a. Merupakan kota yang cenderung terus berkembang mengikuti perkembangan seiring dengan laju perkembangan kota Banda Aceh.
- b. Pulo Aceh memiliki karakter dan keunggulan sebagai kawasan pengembangan perikanan dan pariwisata yang secara teoritis dapat menimbulkan investasi penggunaan lahan dan 'geliat' kegiatan ekonomi.

Untuk mendukung analisis yang akan dilakukan, dibutuhkan data (sumber data sekunder) yang meliputi data base kecamatan Pulo Aceh. Kondisi aspek spasial yaitu peta-peta yang terdapat dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2032 dan didukung oleh data geografis lainnya dan data administrasi daerah penelitian serta data mengenai jumlah, tingkat penyebaran dan kepadatan serta pertumbuhan penduduk. Data dalam penelitian ini bersumber dari publikasi BPS provinsi Aceh. Data dikumpulkan dengan cara mengunduh seluruh laporan hasil statistik Aceh dan selanjutnya data disesuaikan dengan variabel dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Kebutuhan Infrastruktur untuk Pengembangan

Penataan ruang wilayah Pulo Aceh terlepas dari tujuan penataan ruang nasional dan wilayah propinsi. Adapun tujuan umum penataan ruang wilayah Pulo Aceh adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah kota sebagai kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, serta pendidikan.

Disamping tujuan umum tersebut, penataan ruang wilayah Pulo Aceh juga memiliki beberapa tujuan khusus yaitu :

1. Mendorong pertumbuhan Pulo Aceh sebagai pusat kegiatan wilayah di bagian barat Kabupaten Aceh Besar melalui pengalokasian ruang secara efektif dan efisien bagi kegiatan perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata dan industri.
2. Menciptakan keseimbangan alokasi pola ruang untuk peningkatan pelayanan perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang baik dan berwawasan lingkungan.
3. Menetapkan pengelolaan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya

yang dapat menjamin keberlanjutan lingkungan yang sehat dan pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali.

Infrastruktur Transportasi

Sistem jaringan transportasi secara umum harus memperhatikan tiga aspek yaitu: sistem kegiatan sebagai demand (permintaan) terhadap kebutuhan pelayanan jasa transportasi sesuai dengan fungsi kegiatan, sistem jaringan sebagai supply (penyediaan) untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana transportasi, dan sistem pergerakan sebagai akibat adanya interaksi antara pergerakan orang dan barang dalam suatu sistem jaringan transportasi (ship follow trade or trade follow ship).

Dalam RTRW Aceh Besar Tahun 2013-2012 diatur bahwa jaringan jalan di Pulo Aceh terbagi dalam 2 ruas utama, yaitu, yaitu: (1) Ruas Jalan Simpang Gampong Blang - Lintas Pulo Aceh- Keliling Pulo Breuh dengan panjang ruas 21,14 km; (2) Ruas Jalan Keliling Pulo Breuh dengan panjang ruas 41,44 km;

Pengembangan Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan di Pulo Aceh ditentukan berdasarkan hirarki fungsi jaringan jalan, yaitu:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Primer Sistem jaringan jalan arteri primer berfungsi menghubungkan secara menerus antar daerah satu dengan yang lain dan mengakibatkan aksesibilitas wilayah serta fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan bisa optimal.
- b. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer. Sistem jaringan jalan kolektor primer berfungsi menghubungkan secara menerus PKW, Pusat Pelayanan , sampai ke Pusat Pelayanan Lingkungan, serta menghubungkan antar-Sub Pusat yang memiliki ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Sekunder Sistem jaringan jalan arteri sekunder yang merupakan jalan provinsi, dan berfungsi menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder dan seterusnya sampai ke persil yang memiliki ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata

sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

d. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Lokal Primer dan Jalan Lingkungan

Pengembangan sistem jaringan jalan Pulo Aceh direncanakan dengan pola jangka panjang hingga Tahun 2032, yaitu:

- Mengembangkan jaringan jalan yang berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas antara kawasan;
- Mengembangkan jaringan jalan akses yang berfungsi untuk mendistribusikan pergerakan eksternal dan melintas ke jaringan jalan lingkar;

Dalam RTRW 2013-2032 Aceh Besar terdapat rencana Ruas Jalan Kolektor Primer 1 (K1) dengan status jalan Strategis Nasional di Kecamatan Pulo Aceh dengan total panjang 3,63 Km, terdiri atas: 1. Rencana Pembangunan Jembatan Pulau Breueh -Pulau Nasi dengan panjang 0,34 km; 2. Rencana Pembangunan Jembatan Batee Rayeuk - Pulau Breueh dengan panjang 3,27 km.

Pengembangan Jembatan

Pengembangan jembatan direncanakan bersamaan dengan pengembangan jaringan jalan dan pengembangan kawasan baru untuk mempermudah akses pada kawasan daerah yang dialiri oleh aliran sungai. Lokasi-lokasi pembangunan ada di titik-titik strategis wilayah yang memiliki akses mobilitas penduduknya tinggi

Pengembangan terminal

Pengembangan terminal meliputi dua hal. Pertama, merelokasi terminal dengan membangun terminal. Relokasi terminal ini dilakukan mengingat luas dan kondisi terminal yang ada sekarang untuk menampung arus sirkulasi kendaraan dan penumpang yang ada. Kedua, Revitalisasi dan pengembangan Terminal untuk mendukung pengembangan wilayah.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum

Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum mencakup:

Mempertahankan trayek angkutan dengan moda angkutan yang sudah ada saat ini;

1. Mempertahankan dan menambah trayek angkutan sesuai dengan perubahan hierarki jalan;

2. Menyediakan halte-halte angkutan umum
3. Pengembangan Transportasi laut
4. Pengembangan Transportasi laut meliputi :
5. Tatanan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan, pengumpul, pelabuhan bongkar muat, dan pelabuhan rakyat.
6. Perluasan dan pengembangan pelabuhan bongkar muat barang, dan pelabuhan rakyat
7. Peningkatan kelengkapan prasarana dan sarana pelabuhan laut, seperti pembangunan dan perluasan dermaga sandar, revitalisasi fasilitas bongkar muat barang dan pergudangan, serta sarana prasarana penunjang lainnya.
8. Untuk menunjang transportasi ada rencana pembangunan Sarana Transportasi LRT yang menghubungkan secara melingkar antara ibukota kecamatan. fishing port, cruise, ferry port, air port, marina hotel di Pulo Nasi.

Pengembangan Sistem Jaringan Energi/ Kelistrikan

Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat maka dikembangkan PLTD yang akan didukung oleh tiga bentuk pengembangan, yaitu rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik, rencana pengembangan jaringan tenaga listrik dan rencana pengembangan sistem jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas.

Rencana Pembangunan Power Plant Energi Arus Laut Arus antara pulo Breueh dan pulo Nasi laut potensial untuk dibangun tidal energy juga merupakan aset yang sangat berharga bagi pembangkit listrik. Arus tersebut tidak akan habis karena adanya kepastian aliran air laut dari Samudera Hindia ke Selat Malaka atau sebaliknya dari Selat Malaka ke Samudera Hindia.

Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air Terdiri atas

- a. Konservasi sumber daya air: perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- b. Pendayagunaan sumber daya air: penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan air baku, terdiri atas: kerjasama terpadu pengadaan air baku antar wilayah melalui Sistem Pengelolaan Air Minum PDAM;

Pengembangan sistem jaringan irigasi, terdiri atas:

- a. Pelayanan irigasi melayani areal pertanian yang ditetapkan sebagai budidaya tanaman pangan berkelanjutan dan areal pertanian hortikultura yang ditetapkan berdasarkan rencana pola ruang;
- b. Pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air.
- c. Pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pengembangan sistem pengendalian banjir, terdiri atas: - normalisasi aliran sungai-sungai utama. - pengembangan kolam retensi untuk menampung dan menghambat kecepatan aliran air hujan. - membatasi kegiatan fisik dan/atau non fisik pada hulu dan hilir wilayah sungai; dan - pemulihan fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumberdaya air.
- d. Pengembangan sistem pengamanan pantai berupa pengurangan laju angkutan sedimen sejajar pantai

Dalam hal jaringan irigasi, baik Jaringan irigasi non teknis, maupun setengah teknis, dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan pengairan lahan-lahan pertanian. Sumber-sumber air untuk sistem irigasi ini dapat dilakukan dengan mengalirkan air dari waduk dan cekdam dan embung yang ada. Jaringan irigasi ini dapat dibedakan menjadi saluran primer dan sekunder. Saluran primer dialirkan untuk pemerataan distribusi untuk kebutuhan dalam areal yang lebih luas, sedangkan pendistribusian air untuk wilayah yang lebih kecil dapat menggunakan saluran sekunder yang merupakan percabangan dari saluran primer. Pengembangan saluran irigasi (primer dan sekunder).

Di Kecamatan Pulo Aceh terdapat beberapa DAS, yaitu : DAS Krueng Reundrah seluas 3.076,87 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Pulo Aceh; DAS Krueng Teunom seluas 461,61 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Pulo Aceh; DAS Krueng Same seluas 2.735,16 Ha meliputi sebagian Kecamatan Pulo Aceh; dan. DAS Krueng Sotoy seluas 2.782,08 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Pulo Aceh.

Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Minum

Rencana pengembangan sistem prasarana penyediaan air minum kota terdiri atas:

1. Pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum
2. Pemerataan jaringan distribusi ke pelanggan

Pengembangan Sistem jaringan Persampahan

Pola pengelolaan sampah yang berkembang saat ini di Pulo Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Sistem individual langsung yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan secara door to door dengan mendatangi sumber sampah, dimana sampah tersebut akan diangkut dengan menggunakan truk biasa atau dump truk.
- b. Sistem individual tak langsung yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan secara door to door yang dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan gerobak serta truk kecil dan sampah yang ada ditampung di tempat penyimpanan sementara yang berupa kontainer, dan kemudian sampah yang terkumpul tersebut dipindahkan ke TPS.
- c. Sistem Komunal yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan oleh masing-masing penghasil sampah dan dibuang ke tempat-tempat yang telah disediakan oleh dinas kebersihan. Sebagai tempat penampungannya berupa kontainer, kemudian di buang ke TPA. Selain itu dilakukan penanganan secara langsung oleh para penghasil sampah, yaitu dengan dibakar atau ditimbun pada lahan-lahan kosong.

Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah terdiri dari:

1. Sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
2. Sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun berkelompok skala kecil.
3. Penanganan air limbah secara ketat pada lingkup kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, Pelabuhan laut, terminal, serta Rumah sakit berupa penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada masing-masing kawasan,
4. Penanganan limbah pada rumah sakit dengan menyediakan insenerator di Puskesmas.
5. Rencana sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat dilakukan melalui pengembangan sistem pengelolaan air limbah secara komunal di pusat-pusat pelayanan lingkungan.

Pengembangan Sistem Drainase

Pengembangan sistem jaringan drainase serta pengendalian banjir dan genangan dilakukan melalui:

1. Penyediaan saluran drainase pada kawasan terbangun dan kawasan rawan genangan.
2. Pengembangan sistem pengendalian banjir lintas kota-kabupaten dari hilirhulu di bawah koordinasi Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWS) Provinsi Aceh untuk sungai-sungai yang sering menimbulkan banjir .
3. Normalisasi sungai di kawasan permukiman atau pusat kegiatan dengan cara pengerukan pada sungai yang dangkal, pelebaran sungai, serta pengamanan di kawasan sepanjang sempadan sungai.
4. Normalisasi saluran yang sudah tidak mampu menampung air hujan maupun air limbah dengan memperlebar saluran dan/atau memperdalam dasar saluran.
5. Membangun tanggul-tanggul beberapa sungai yang dekat dengan permukiman penduduk sesuai tinggi elevasi yang dianjurkan.
6. Pengembangan jaringan drainase sistem terbuka di kawasan permukiman dan di sepanjang jaringan jalan, serta membangun sistem drainase tertutup dan terbuka pada kanan-kiri jalan dengan arah pengaliran disesuaikan dengan kondisi topografi setempat.

Pengembangan Kawasan Industri

Pengembangan Kawasan industri dan pergudangan direncanakan : - Pengembangan Kawasan industri perikanan berupa pengembangan industri pengeolahan hasil perikanan dan industri pengolahan hasil pertanian .Pengembangan Kawasan industri kecil atau industri tenunan tradisional dengan skala regional dan lokal yang di dukung oleh kegiatan industri di seluruh Gampong.

Pengembangan Kawasan Pariwisata

Secara umum obyek wisata yang ada di wilayah Pulo Aceh dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu obyek wisata alam pantai dan obyek wisata sejarah/situs sejarah. Kekurangan yang cukup menonjol terhadap berbagai obyek wisata yang ada di Pulo Aceh

adalah belum adanya penanganan obyek-obyek wisata secara konsisten untuk mendukung perkembangan wilayah secara keseluruhan, sehingga nilai yang ingin didapatkan dari masing-masing obyek tersebut belum optimal. Salah satu contoh kekurangan dalam penataan obyek wisata adalah dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan serta peningkatan sarana fisik dalam obyek yang bersangkutan. Kekurangan lain yang cukup menonjol adalah kurang tersedianya fasilitas dan sarana yang mendukung keberadaan obyek tersebut, sehingga yang nampak adalah kondisi yang serba tanggung antara keinginan untuk pengembangan dengan keterbatasan yang ada.

SIMPULAN

Letak dan geografis Pulo Aceh yang sangat strategis dan cocok untuk pengembangan investasi dalam industri perikanan dan pariwisata baik dalam negeri atau luar negeri..

Terdapat beberapa strategi utama yang perlu dipertimbangkan antara lain:

Peningkatan infrastruktur Jalan Arteri Primer, dan kolektor sekunder guna mempermudah akses perekonomian dari dan ke luar, dalam hal ini adalah pendistribusian hasil pertanian, industry perikanan maupun pariwisata,

Peningkatan Infrastruktur jalan juga memiliki manfaat terhadap ekonomi dan sosial. Di samping itu ada manfaat lainnya yaitu manfaat politis yaitu pengangkutan menciptakan persatuan dan kesatuan yang semakin kuat dan meniadakan isolasi, pengangkutan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan atau diperluas dengan merata pada setiap bagian wilayah, keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri karena gugusan Pulo Aceh sebagai wilayah perbatasan Negara.

Dari penjelasan diatas, maka perlunya penanganan secara lebih lanjut baik dalam sistem pengelolaan dan pengendalian pada wilayah kawasan strategis agar kedepannya dapat memberikan dampak positif seluas-luasnya bagi aspel fisik, sosial, dan perekonomian wilayah baik dalam konstelasi lokal maupun regional. Untuk itu, sebagai bentuk penanganan dini dilakukan antisipasi perkembangan dengan peningkatan pelayanan.

Saran

Guna mencapai terwujudnya Perkembangan Wilayah yang sesuai dengan RTRW dan terwujudnya Pulo Aceh sebagai Kawasan Andalan perlu kerjasama berbagai *stakeholder* yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Dalam hal pendanaan perlu kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sekitar yaitu Pemerintah Aceh Besar, Pemerintah Kota Sabang dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Pemerintah Provinsi Aceh dan dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisasmita,.,1982, *Beberapa Dimensi Ekonomi Wilayah*. Universitas Hasanuddin : Ujung Pandang.
- Azis, I. J. (1995). *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: FE Universitas Indonesia.
- Barlowe, R., 1986, *Land Resource Economics The Economics Of Real Estate. Four Edition*. Prentice-Hall, Engelwood Cliffs, New Jersey.
- Branch, Melville C., 1996, *Perencanaan Kota Komprehensif; Pengantar dan Penjelasan*. Alih Bahasa
- Bambang Hari Wibisono. *Penyunting Achmad Djunaedi*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Budihardjo, Eko, 1991, *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung
- Christaller, W., 1933, *Central Places in Southern Germany. Terjemahan oleh Baskin, E.W.* 1966. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Conyers, D., and Hills, P., 1984, *An Introduction to Development Planning In The Third World*. Chapter 1 – 4. John Willey and Sons; Chichester
- Andreas, 1976, *Planning Teory*. Pergamon Press : Oxford.
- Sukirno,Sudono.2007.*Ekonomi Pembangunan: Proses,Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Kencana Persada Media Group : Jakarta
- Firman, T., 1996, *Intisari Teori Pengembangan Wilayah*. Lokakarya MTKLH PW, ITB : Bandung.
- Friedman, J., and Alonso, W. (Ed.), 1975, *Regional Policy Reading in Theory and Aplication*. The MIT Press : Cambridge, Massachusetts, and London, England.
- Hadjisarosa, P., 1974, *Mekanisme Pengembangan Wilayah Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)*. Departemen Pekerjaan Umum R.I. : Jakarta.

- Hirschman, A. O. ,1958, *The Strategy of Economic Development*. Yale University Press: New Haven.
- Ilhami, 1990, *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Usaha Nasional : Surabaya.
- Patra, A.K., & Acharya, A. (2011). Regional disparity, infrastructure development and economic growth: An inter-state analysis. *Research and Practice in Social Sciences*, 6 (2), 17-30.
- Patel, P. R., & Padhya, H. J. (2014). Review paper for Smart City, 1–6.
- Pebrina, Intan Yudistri. 2005. Analisis pusat pertumbuhan ekonomi pada tingkat kecamatan
- Sihombing, R.G, et.al, Strategi Pengembangan Wilayah-Wilayah Menjadi Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Sektor Basis di Kabupaten Mimika, dalam *Jurnal Kritis, Vol No. 4 Tahun 2020* Sinar Grafika di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Vol 4, No.1., *Jurnal Kajian Ekonomi*
- Perroux, F., 1955, *Teori-Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah*. Dirujuk oleh Rahardjo Adisasmita.1989. Bab VI hal. 29. Universitas Hasanuddin: Ujung Pandang.
- Renyansih, 1989, *Pengaturan Tata Ruang Daerah dan Kota. Pengaturan Bidang Ke-Cipta Karyaan Dep. P.U.. Direktorat Jendral Cipta Karya*. Ujung Pandang, 9 – 11 Pebruari, Hal. 4 – 5 .
- Richardson, H. W. ,1969, *Regional Economic: Location Theory, Urban Structure and R Structure and Regional Change*. Weidenfeld and Nicolson, London